

Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). 2026. Pentingnya Menjaga Stabilitas Harga MGS untuk Menjamin Kontribusi Asupan Vitamin A dari MGS Kemasan. *Policy Brief KFI*. Halaman 1-6.

Latar Belakang

Minyak Goreng Sawit (MGS) adalah salah satu pangan strategis dalam pola konsumsi di Indonesia. Dengan konsumsi hampir 10 kg per kapita per tahun¹ dan digunakan oleh hampir seluruh rumah tangga², MGS memiliki potensi untuk menjadi intervensi gizi skala nasional. Melalui fortifikasi vitamin A yang telah berjalan sejak SNI 7709 diberlakukan, MGS kemasan terbukti mampu meningkatkan kadar serum retinol dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) secara signifikan^{3,4}. Ini menjadikan MGS bukan sekadar sumber energi, tetapi alat kebijakan publik yang sangat efektif untuk memperkuat gizi masyarakat⁵.

Namun, implementasi fortifikasi yang bertumpu pada minyak kemasan belum menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Dominasi minyak curah yang *tidak* difortifikasi, membuat manfaat program ini sangat timpang. Hampir 70% rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah di luar Jawa, masih bergantung pada minyak curah yang sama sekali tidak mengandung vitamin A tambahan⁶. Artinya, kelompok yang paling rentan terhadap KVA justru menerima manfaat paling sedikit dari kebijakan fortifikasi yang ada.

Lonjakan harga minyak kemasan memperburuk situasi. Ketika harga naik, rumah tangga miskin akan langsung beralih ke minyak curah yang lebih murah⁷, tetapi tanpa vitamin A—membuat kontribusi fortifikasi terhadap asupan vitamin A nasional ikut merosot. Ketimpangan distribusi minyak kemasan juga memperlebar kesenjangan gizi antarwilayah⁸. Jika tidak ada kebijakan yang memastikan harga tetap terjangkau dan distribusi merata, upaya fortifikasi yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade berisiko kehilangan dampaknya.

Karena itu, menjaga stabilitas harga dan memastikan akses luas terhadap MGS fortifikasi bukan sekadar isu *supply chain*—ini adalah intervensi gizi vital. Ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng fortifikasi menentukan apakah Indonesia dapat melindungi jutaan anak, ibu, dan keluarga dari risiko kekurangan vitamin A, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan dan pembangunan manusia.



Permasalahan Utama dan Dampaknya Terhadap Asupan Vitamin A

1. Penurunan Konsumsi MGS Kemasan: Ancaman bagi Cakupan Fortifikasi

Dalam satu tahun terakhir, konsumsi MGS kemasan—satu-satunya minyak yang difortifikasi vitamin A—turun tajam dari 38,4% menjadi 28,4% rumah tangga⁹. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa mayoritas rumah tangga kembali ke minyak curah non-fortifikasi. Setiap penurunan konsumsi

MGS kemasan berarti penurunan langsung asupan vitamin A masyarakat, terutama kelompok rentan. Tanpa intervensi, cakupan fortifikasi akan terus menyusut dan manfaat program selama satu dekade terakhir terancam hilang.

¹ Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). (2025). Profil Konsumsi Pangan Fortifikasi Wajib dan Asupan Zat Gizi Mikro di Indonesia Berdasarkan Analisis SUSENAS 2024.

² Martianto D, M Soekarti. 2005. Possibility of Vitamin A Fortification on Cooking Oil in Indonesia: A Feasibility Analysis. Koalisi Fortifikasi Indonesia and Micronutrient Initiatives, Canada.

³ Sandjaja, Sudikno, Jus`at. 2015. Konsumsi Minyak Goreng Dan Vitamin A Pada Beberapa Kelompok Umur di Dua Kabupaten. *Penelitian Gizi Dan Makanan*. 38(1): 1-10.

⁴ Achadi E, Arifah S, Muslimatun S, Anggondowati T, Setiari A. 2010. Efektivitas Program Fortifikasi Minyak Goreng dengan Vitamin A terhadap Status Gizi Anak Sekolah di Kota Makasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. 4(6): 255-261.

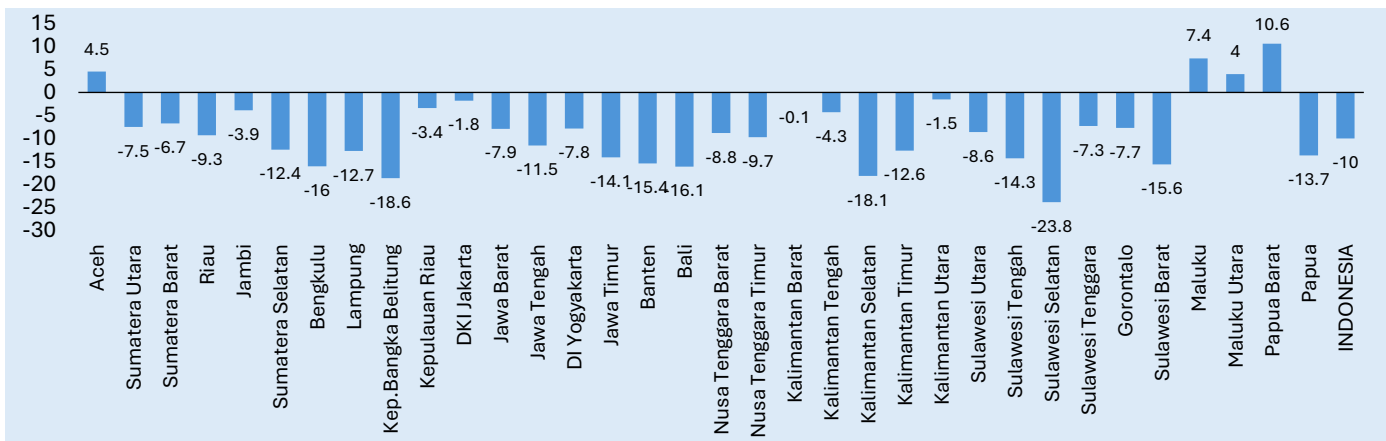
⁵ Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). (2025). *Mewujudkan fortifikasi MGS universal: Peluang, tantangan, dan strategi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

⁶ Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). (2025). *Mewujudkan fortifikasi MGS universal: Peluang, tantangan, dan strategi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

⁷ Sandjaja, S., et al. (2015). Konsumsi minyak goreng dan vitamin A pada beberapa kelompok umur di dua kabupaten. *Jurnal Gizi dan Makanan*, 38(1), 1–10.

⁸ UNICEF. (2023). *Ringkasan: Fortifikasi minyak goreng di Indonesia*. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/20981/file/Ringkasan%20Fortifikasi%20Minyak%20Goreng%20di%20Indonesia.pdf>

⁹ Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). (2025). Profil Konsumsi Pangan Fortifikasi Wajib dan Asupan Zat Gizi Mikro di Indonesia Berdasarkan Analisis SUSENAS 2024.



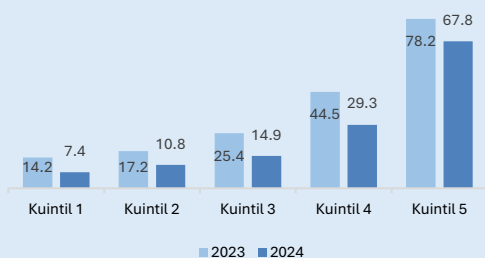
Sumber: SUSENAS 2023 dan 2024

Gambar 1. Selisih cakupan rumah tangga yang mengonsumsi MGS kemasan di rumah tangga (%), 2023–2024

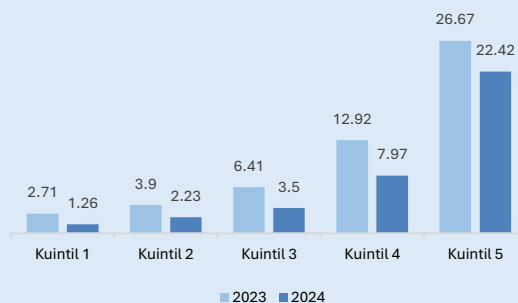
2. Ketimpangan Akses Berdasarkan Pendapatan dan Wilayah

Kesenjangan konsumsi sangat tajam: hanya 7,4% rumah tangga termiskin yang membeli MGS kemasan, dibanding 67,8% pada kelompok terkaya. Rata-rata konsumsi kelompok miskin hanya sekitar 5% dari kelompok kaya. Pola yang sama muncul antarwilayah—wilayah perdesaan dan luar Jawa

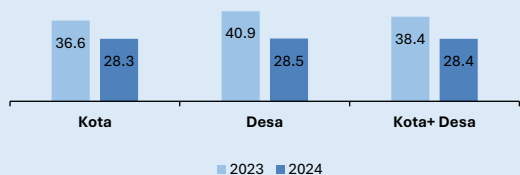
semakin bergantung pada minyak curah karena harga dan ketersediaan. Akibatnya, kelompok yang paling rentan terhadap KVA justru paling sedikit menerima manfaat fortifikasi. Ketidakadilan gizi ini tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi prioritas kebijakan.



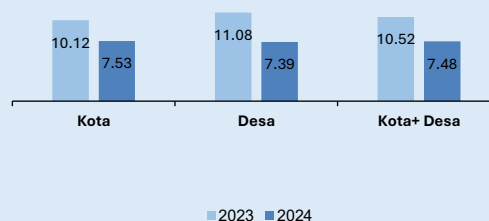
Gambar 2. Perbandingan cakupan rumah tangga yang mengonsumsi MGS Kemasan di rumah tangga (%) tahun 2023 dan 2024 berdasarkan kuintil pendapatan



Gambar 3. Perbandingan rata-rata konsumsi MGS Kemasan (g/kap/hari) tahun 2023 dan 2024 berdasarkan kuintil pendapatan



Gambar 4. Perbandingan cakupan rumah tangga yang mengonsumsi MGS Kemasan di rumah tangga (%) tahun 2023 dan 2024 berdasarkan wilayah tempat tinggal



Gambar 5. Perbandingan rata-rata konsumsi MGS Kemasan (g/kap/hari) tahun 2023 dan 2024 berdasarkan wilayah tempat tinggal

3. Kenaikan Harga sebagai Hambatan Akses terhadap MGS Fortifikasi

Harga MGS kemasan naik menjadi Rp21.427/liter pada 2024, dengan selisih harga terhadap minyak curah masih sangat besar (1,51 kali). Bagi rumah tangga miskin, selisih ini cukup untuk mengalihkan konsumsi ke minyak curah non-fortifikasi. Selama

akses bergantung pada daya beli, fortifikasi tidak akan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Tanpa stabilisasi harga dan distribusi, fortifikasi hanya efektif bagi kelas menengah—dan gagal sebagai kebijakan gizi populasi.

Provinsi	Harga MGS Kemasan (Rp/Liter)			Harga MGS Curah (Rp/Liter)			Perbandingan Harga MGS Kemasan terhadap MGS Curah	
	2023	2024	Selisih	2023	2024	Selisih	2023	2024
Aceh	19707	20110	402	13520	14802	1282	1,46	1,36
Sumatera Utara	19940	20282	342	14445	15085	640	1,38	1,34
Sumatera Barat	18881	19787	906	14775	15783	1008	1,28	1,25
Riau	19767	20610	843	14765	15418	653	1,34	1,34
Jambi	19617	19854	237	14271	14976	705	1,37	1,33
Sumatera Selatan	18763	18962	199	13603	14579	976	1,38	1,30
Bengkulu	20031	20314	284	14367	14355	-12	1,39	1,42
Lampung	18698	19326	628	13846	14561	715	1,35	1,33
Kep. Bangka Belitung	18364	19350	986	15266	15815	549	1,20	1,22
Kepulauan Riau	20143	20305	162	13111	13895	783	1,54	1,46
DKI Jakarta	23127	21937	-1189	13757	14657	899	1,68	1,50
Jawa Barat	22047	22321	274	12745	13303	558	1,73	1,68
Jawa Tengah	20104	20673	570	13117	13861	744	1,53	1,49
DI Yogyakarta	22669	23367	698	14200	13907	-292	1,60	1,68
Jawa Timur	20481	20131	-350	13725	14359	634	1,49	1,40
Banten	20505	20518	13	13453	14070	616	1,52	1,46
Bali	19775	20653	878	12900	13301	401	1,53	1,55
Nusa Tenggara Barat	20411	20599	188	13614	14027	414	1,50	1,47
Nusa Tenggara Timur	21682	21626	-56	13486	13362	-124	1,61	1,62
Kalimantan Barat	20194	20086	-108	14408	15163	755	1,40	1,32
Kalimantan Tengah	20928	21700	772	13612	15165	1553	1,54	1,43
Kalimantan Selatan	19283	19981	697	13943	14686	743	1,38	1,36
Kalimantan Timur	20664	20973	309	14397	15697	1300	1,44	1,34
Kalimantan Utara	20264	20891	627	14784	15456	671	1,37	1,35
Sulawesi Utara	19614	21151	1538	14548	14374	-175	1,35	1,47
Sulawesi Tengah	20141	20096	-45	13840	14445	605	1,46	1,39
Sulawesi Selatan	19590	20172	582	14021	14446	425	1,40	1,40
Sulawesi Tenggara	20272	20802	530	13536	14401	866	1,50	1,44
Gorontalo	20766	21671	905	13802	15809	2007	1,50	1,37
Sulawesi Barat	19805	21203	1398	13044	14102	1058	1,52	1,50
Maluku	20904	21487	584	14878	15277	399	1,41	1,41
Maluku Utara	23718	22973	-745	14393	15282	889	1,65	1,50
Papua Barat	22892	26182	3290	13999	15009	1011	1,64	1,74
Papua	32606	23638	-8968	14075	13960	-115	2,32	1,69
Total	20840	21427	587	13573	14218	644	1,54	1,51

Sumber: SUSENAS 2023 dan 2024, diolah

Catatan: Harga yang tercantum adalah rata-rata harga yang dibayarkan oleh konsumen, bukan harga riil di pasar

4. Dampak terhadap Asupan Vitamin A dan Risiko Gizi Mikro

Setiap penurunan 1 g MGS kemasan mengurangi sekitar 13,5 µg RE vitamin A. Dengan penurunan rata-rata konsumsi nasional, asupan vitamin A turun sekitar 40 µg RE dibandingkan tahun 2023. Tingkat kecukupan vitamin A nasional juga turun dari 108,6% menjadi 98,7%. Pada kelompok miskin, penurunan lebih tajam karena mereka mengandalkan minyak curah dan mengonsumsi sayur serta pangan hewani dalam jumlah rendah. Tanpa tindakan korektif, risiko defisiensi vitamin A dapat meningkat kembali, terutama pada balita dan ibu hamil.

Temuan ini menunjukkan bahwa fortifikasi MGS tidak dapat berdampak optimal tanpa kebijakan harga dan distribusi yang mendukung. Selama minyak curah lebih murah dan lebih mudah diakses, kelompok miskin akan terus mengonsumsi minyak non-fortifikasi dan tetap berada dalam lingkaran kekurangan gizi mikro. Dengan memastikan harga terjangkau dan ketersediaan MGS fortifikasi yang merata, kebijakan fortifikasi dapat kembali menjadi instrumen kuat untuk melindungi status vitamin A jutaan keluarga Indonesia

Analisis Kebijakan

Kebijakan harga dan distribusi minyak goreng nasional saat ini berfokus pada stabilisasi pasar melalui *Domestic Market Obligation* (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana diatur dalam Permendag No. 18/2024¹⁰. Regulasi ini menegaskan bahwa kewajiban DMO kini diarahkan khusus pada minyak goreng kemasan MinyaKita, bukan lagi untuk minyak goreng curah. Artinya, produsen yang ingin mengeksport produk turunan sawit wajib menyuplai kebutuhan domestik melalui minyak goreng kemasan rakyat. Langkah ini diharapkan dapat mengalihkan sebagian pasokan dari minyak curah ke minyak kemasan yang lebih higienis, aman, dan memenuhi standar fortifikasi vitamin A sesuai SNI 7709:2019.

Penetapan HET MinyaKita sebesar Rp15.700/liter¹¹ dilakukan untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi, distribusi, dan margin produsen melalui Kepmendag 1028/2024. Tetapi kenaikan harga ini memperlebar jarak dengan minyak curah yang rata-rata hanya Rp14.200/liter (2024)¹². Dengan selisih harga mencapai Rp3.500–Rp11.000 di berbagai provinsi, rumah tangga berpendapatan rendah hampir pasti memilih minyak curah non-fortifikasi. Selama disparitas harga ini bertahan, kebijakan fortifikasi MGS tidak akan menjangkau kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Secara distribusi, minyak curah tetap dominan karena jaringan pasarnya lebih panjang, luas, dan mudah diakses, terutama di perdesaan dan luar Jawa. Walaupun mekanisme DMO baru dilengkapi faktor pengali wilayah untuk mendorong pemerataan pasokan¹³, implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan produsen serta pengawasan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan dan insentif yang kuat, minyak kemasan fortifikasi cenderung mengalir ke pasar perkotaan dengan daya beli lebih tinggi, sementara daerah rentan tetap bergantung pada minyak curah yang tidak difortifikasi.

Implikasinya terhadap keberlanjutan program fortifikasi vitamin A sangat signifikan. Karena fortifikasi hanya diwajibkan pada MGS kemasan, setiap hambatan harga dan distribusi langsung menurunkan cakupan dan kontribusi fortifikasi terhadap asupan vitamin A nasional. Risiko ini menjadi lebih besar ketika tren konsumsi menunjukkan peralihan kembali ke minyak curah, terutama di kalangan rumah tangga miskin.

Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Keputusan Kepala BGN No. 63/2025¹⁴, yang mewajibkan penggunaan minyak goreng fortifikasi dalam Program Makan Bergizi (MBG) di lebih dari 32.000 SPPG, membuka peluang strategis. Program MBG dapat menjadi kanal distribusi besar untuk minyak goreng fortifikasi, sekaligus instrumen stabilisasi permintaan dan harga melalui pengadaan publik. Namun, agar dampaknya optimal, kebijakan MBG perlu diintegrasikan secara erat dengan kebijakan harga, logistik, dan produksi MGS kemasan.

Ke depan, kebijakan minyak goreng perlu bergerak dari sekadar stabilisasi pasar menuju *stabilisasi gizi*. Instrumennya meliputi:

- skema *price equalization* atau subsidi logistik untuk memperkecil gap harga kemasan–curah.
- insentif bagi produsen yang menyalurkan produk fortifikasi ke wilayah dengan konsumsi rendah.
- penguatan pengawasan distribusi hingga tingkat kabupaten/kota.
- dan integrasi penuh program MBG dengan kebijakan fortifikasi sebagai bagian dari strategi pengurangan kekurangan gizi mikro nasional.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan harga dan distribusi tidak hanya menjaga stabilitas pasar, tetapi juga memastikan minyak goreng fortifikasi berfungsi sebagai instrumen gizi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.



¹¹ Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) Minyak Goreng.

¹² Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). (2025). Profil Konsumsi Pagan Fortifikasi Wajib dan Asupan Zat Gizi Mikro di Indonesia Berdasarkan Analisis SUSENAS 2024.

¹³ Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI

¹⁴ Kementerian Gizi Nasional / Badan Gizi Nasional. (2025). Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Badan Gizi Nasional.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memastikan fortifikasi vitamin A melalui minyak goreng benar-benar menjangkau kelompok rentan dan tidak tergerus oleh dinamika harga serta dominasi minyak curah, diperlukan penataan kebijakan yang terintegrasi dan pro-gizi. Rekomendasi utama adalah sebagai berikut:

1 Terapkan Fortifikasi Universal (Kemasan dan Curah)

Fortifikasi wajib harus mencakup seluruh jenis MGS—baik kemasan maupun curah—agar efektivitas program tidak tergantung pada preferensi konsumsi atau selisih harga. Pengawasan mutu dilakukan di hulu, pada tahap pascaproduksi sebelum distribusi. Ini adalah langkah paling strategis untuk menutup kesenjangan akses gizi.

2 Stabilkan Harga MGS Fortifikasi melalui Skema Pro-Gizi

Pemerintah perlu mengembangkan:

- **Subsidi harga diferensial** bagi wilayah dan kelompok berpendapatan rendah;
- **Price equalization** antarwilayah untuk menekan disparitas Jawa–non-Jawa; dan
- Integrasi langsung dengan **mekanisme DMO** untuk menjaga pasokan dan mencegah kelangkaan.

Keterjangkauan adalah kunci untuk menghindari peralihan konsumsi kembali ke minyak curah.

3 Integrasikan MGS Fortifikasi ke Program Bantuan Pangan

Masukkan minyak goreng fortifikasi ke dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program MBG, dan intervensi sosial lain. Program MBG (sesuai Kepkaban BGN No. 63/2025) dapat menjadi jalur distribusi terbesar untuk menjangkau kelompok miskin dan daerah tertinggal.

4 Berikan Insentif Distribusi ke Daerah Sulit Akses

Industri perlu didorong untuk menyalurkan produk fortifikasi ke wilayah dengan konsumsi rendah melalui:

- insentif logistik,
- pengurangan biaya distribusi,
- dan pemanfaatan **faktor pengali regional** dalam Kepmendag 1029/2024.

Langkah ini penting untuk mengurangi ketimpangan geografis.

5 Perkuat Pengawasan Mutu dan Edukasi Publik

Pengawasan terhadap minyak curah non-fortifikasi harus diperketat melalui:

- sertifikasi produk,
- inspeksi rantai pasok, dan
- sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi SNI fortifikasi.

Kampanye publik tentang manfaat minyak fortifikasi dan risiko minyak curah perlu diperluas untuk meningkatkan permintaan yang didorong oleh kesadaran konsumen.

6 Perkuat Sistem Pemantauan Nasional

Integrasikan data SUSENAS, SKMI, dan sistem informasi gizi nasional untuk memantau cakupan konsumsi minyak goreng fortifikasi dan status vitamin A secara berkala. Pemantauan berbasis data ini penting untuk merancang koreksi kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan fortifikasi minyak goreng tidak hanya menjadi strategi teknis dalam memperkaya pangan, tetapi juga instrumen penting dalam mencapai ketahanan gizi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Referensi

- Achadi, E., Arifah, S., Muslimatun, S., Anggondowati, T., & Setiarini, A. (2010). *Efektivitas program fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A terhadap status gizi anak sekolah di Kota Makassar*. **Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional**, 4(6), 255–261.
- Kementerian Gizi Nasional. (2025). *Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025*. Badan Gizi Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat*. Kementerian Perdagangan RI.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Minyak Goreng*. Kementerian Perdagangan RI.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1029 Tahun 2024 tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan, Faktor Pengali Regional, dan Insentif Tambahan Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Minyak Goreng*. Kementerian Perdagangan RI.
- Koalisi Fortifikasi Indonesia. (2025). *Profil konsumsi pangan fortifikasi wajib dan asupan zat gizi mikro di Indonesia berdasarkan analisis SUSENAS 2024*. Koalisi Fortifikasi Indonesia.
- Koalisi Fortifikasi Indonesia. (2025). *Mewujudkan fortifikasi MGS universal: Peluang, tantangan, dan strategi*. PT Penerbit IPB Press.
- Martianto, D., & Soekarti, M. (2005). *Possibility of vitamin A fortification on cooking oil in Indonesia: A feasibility analysis*. Koalisi Fortifikasi Indonesia & Micronutrient Initiatives.
- Sandjaja, S., Sudikno, Jus'at. (2015). *Konsumsi minyak goreng dan vitamin A pada beberapa kelompok umur di dua kabupaten*. *Penelitian Gizi dan Makanan*, 38(1), 1–10.
- UNICEF. (2023). *Ringkasan: Fortifikasi minyak goreng di Indonesia*.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/20981/file/Ringkasan%20Fortifikasi%20Minyak%20Goreng%20di%20Indonesia.pdf>

